



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN  
BAPPEDALITBANG KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2023

BAPPEDALITBANG KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2023

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM**

### **1.1 PENDAHULUAN**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu :

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. Keandalan laporan keuangan;
3. Pengamanan aset negara;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

### **1.2 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Tindak Pengendalian yang digunakan sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan

dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Tujuan pembangunan daerah yang menjadi ampunan Bappedalitbang seperti yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Rencana Tindak Pengendalian ini diprioritaskan untuk pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **1.3 DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

### **1.4 TUJUAN**

Tujuan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian untuk memberikan acuan Bappedalitbang dalam mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

### **1.5 MANFAAT**

Manfaat penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian di lingkungan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh di lingkungan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas;
- 2) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas ;

### **1.6 RUANG LINGKUP**

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas. Sesuai hasil mapping terhadap Pemutakhiran Peremendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berikut merupakan kegiatan pada urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan yaitu:

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Daerah
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
6. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
7. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

8. Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan
9. Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
10. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Penentuan evaluasi lingkungan pengendalian Bappedalitbang Kabupaten Banyumas merupakan hasil rekapitulasi evaluasi lingkungan pengendalian yang telah dilakukan di seluruh bagian di lingkungan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas. Sedangkan penilaian risiko merupakan hasil pemetaan dari risiko yang terpilih. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian melibatkan seluruh jajaran baik pimpinan maupun pegawai di lingkungan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.

## **BAB II**

# **SEKILAS TENTANG SPIP**

### **2.1 PENGERTIAN SPIP**

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

### **2.2 TUJUAN SPIP**

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **2.3 UNSUR-UNSUR SPIP**

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut, yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang dibangun

dan diciptakan dalam organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan :

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan

mempertimbangkan kecukupan pengendalian *existing*.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan penilaian risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan

kondisi internal dan eksternal organisasi. Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit.

#### **2.4 PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri / Pimpinan Lembaga/ Gubernur / Bupati / Walikota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, maka dipandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

## **BAB III**

# **LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

### **3.1 LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

### **3.2 KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

Kondisi lingkungan pengendalian Bappedalitbang Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Sub Unsur</b>	<b>Kondisi</b>
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai
2	Komitmen terhadap kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai

No	Sub Unsur	Kondisi
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	Memadai

Survei persepsi yang telah dilaksanakan pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas melibatkan ASN pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas sebagai responden. Responden ditetapkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) dari total pegawai 82 (delapan puluh dua) terdiri dari pejabat struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum. Penetapan jumlah responden untuk memenuhi minimal responden yaitu 30% dari total pegawai. Berdasarkan survei persepsi pada 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian menunjukkan hasil bahwa semua sub unsur memadai.

Sedangkan berdasarkan reviu dokumen menunjukkan hasil bahwa terdapat dua sub unsur yang kurang memadai, yaitu sub unsur Kepemimpinan yang Kondusif, dan sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM. Pada sub unsur Kepemimpinan yang Kondusif menunjukkan kelemahan:

- a. Bappedalitbang belum menyusun tujuan, sasaran beserta indikator nya dengan memenuhi kriteria SMART
- b. Bappedalitbang belum melaksanakan monitoring evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, penanganan pengaduan masyarakat, dan penanganan benturan kepentingan

Pada sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM menunjukkan kelemahan bahwa belum semua penggunaan barang persediaan dibuatkan Surat Permintaan Barang (SPB) dan Surat Penyerahan Permintaan Barang (SPPB) dan

dituangkan dalam Berita Acara Stock Opname Barang.

### 3.3 RENCANA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	<b>Kepemimpinan yang Kondusif</b>		
	Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan informasi public	Sekretaris	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2023
	Evaluasi atas kesesuaian indikator kinerja utama	Kepala Badan	Triwulan I Tahun 2023
2	<b>Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM</b>		
	Monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan pengelolaan barang persediaan	Sekretaris	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2023

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada lampiran:

*Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)*

*Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Bappedalitbang Kabupaten Banyumas*

*Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Bapepdalitbang Kabupaten Banyumas*

## **BAB IV**

# **PENILAIAN RISIKO**

### **4.1 PENETAPAN TUJUAN**

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis OPD
- b. Pengelolaan risiko operasional OPD

Bupati Banyumas telah menetapkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Perubahan 2018-2023. Visi Kabupaten Banyumas “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri” yang dijabarkan kedalam delapan Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu:

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
- h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Kedelapan misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

No	Konteks	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator
1.	<b>Risiko strategis</b>	<p><b>Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah</b></p> <p><b>Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan</b></p> <p><b>Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko dalam pencapaian tujuan</b></p>	<p><b>Persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional</b></p> <p><b>Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan</b></p> <p><b>Rata-rata persentase capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah</b></p>
2.	Risiko operasional	<p>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Daerah</p> <p>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p>	<p>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun</p> <p>Persentase keterisian data profil daerah</p> <p>Persentase Program RKPD yang dijabarkan secara konsisten ke dalam APBD Daerah</p> <p>Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun</p>

No	Konteks	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang disusun
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen bidang sosial dan kependudukan yang disusun
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen inovasi daerah yang disusun

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada lampiran:

*Form 2.b : Penetapan konteks risiko strategis Bappedalitbang*

*Form 2.c : Penetapan konteks risiko operasional Bappedalitbang*

#### 4.2 IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam

pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Rincian identifikasi risiko ditunjukkan pada lampiran:

*Form 3.b : Identifikasi risiko strategis Bappedalitbang*

*Form 3.c : Identifikasi risiko operasional Bappedalitbang*

#### 4.3 ANALISIS RISIKO

Tahapan selanjutnya, hasil identifikasi risiko kemudian di analisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan menentukan nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran form 4. Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai tinggi. Berikut adalah daftar risiko prioritas dari hasil analisis risiko Bappedalitbang:

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko
	<b>Risiko Strategis</b>		
1	Hasil penelitian dan pengembangan belum digunakan sebagai dasar kebijakan	505	12,21
2	Fokus kinerja pembangunan belum dilaksanakan secara konsisten	501	12
	<b>Risiko Operasional OPD</b>		
1	Personil tim penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan belum berkontribusi secara optimal	501	12,21
2	Pendanaan tidak konsisten dalam mendukung target kinerja dalam dokumen perencanaan	501	12,21
3	Kualitas data belum memadai	501	12,58
4	Perencanaan kurang sinkron dengan hasil evaluasi periode sebelumnya	501	12,92

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian risiko prioritas dapat dilihat pada lampiran form 5.

Penilaian terhadap pengendalian mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya yang ditunjukkan pada lampiran form 6 dan 7. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

## **BAB V**

# **KEGIATAN PENGENDALIAN**

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan pengendalian yang akan dibangun;
  - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
  - c. Membuat atau menyempurnakan pengendalian;
  - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
  - e. Menyempurnakan rancangan pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
  - f. Menetapkan penerapan pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua bentuk pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati.

## **BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Setelah bentuk pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Bappedalitbang perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam Rencana Tindak Pengendalian meliputi rapat, koordinasi, konsultasi, FGD dan desk.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran form 8.

## **BAB VII PEMANTAUAN**

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai bentuk pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi lampiran form 9.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi lampiran form 10.

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Bappedalitbang Kabupaten Banyumas merupakan bagian dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan bentuk pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun. Komitmen dari seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang professional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Purwokerto, 10 April 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**



**I. KRISTANTA, M.Si**  
**NIP. 19650515 199303 1 012**

HASIL CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																										KESIMPULAN KUOSIONER CEE																					
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26		R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	Modus			
<b>A</b>	<b>PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>																										<b>Memadai</b>																						
1	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	2	3	4	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	4	3	3	2	3	2	3	3	3	4	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	Memadai	
2	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	2	4	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	4	3	3	2	3	3	1	3	4	4	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2	2	3	3	4	2	2	2	2	3	4	3	Memadai		
3	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	2	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	2	2	3	3	Memadai			
4	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	2	3	3	4	3	Memadai		
<b>B</b>	<b>KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>																										<b>Memadai</b>																						
1	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	2	2	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	2	3	4	2	2	2	3	3	3	Memadai			
2	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	2	2	3	3	3	2	3	4	3	4	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	4	3	Memadai
3	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3	4	3	Memadai	
4	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	3	2	3	3	4	2	3	3	3	4	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	Memadai	

C		KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																												Memadai																					
1	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2	3	3	4	3	Memadai							
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	2	3	2	3	1	3	3	2	3	3	1	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	4	1	3	4	3	3	2	4	4	2	3	4	2	2	3	3	4	3	2	3	3	3	3	Memadai					
3	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	2	3	3	2	3	4	4	3	3	3	4	2	4	4	3	3	4	3	2	4	3	4	3	2	3	4	4	3	Memadai					
4	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	Memadai				
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	4	3	3	4	3	3	1	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	Memadai			
6	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	Memadai			
7	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	2	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	2	3	4	3	4	4	2	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	Memadai		
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	2	3	3	4	3	Memadai				
D		PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																												Memadai																					
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	2	2	2	3	3	Memadai		
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	2	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	4	4	3	3	2	3	4	4	3	3	2	3	2	4	4	2	3	4	3	3	4	3	3	2	3	2	3	4	3	Memadai

3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	3	2	4	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	2	3	4	2	1	3	3	3	2	4	4	2	3	2	2	3	2	3	2	3	4	3	Memadai			
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	2	2	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	1	3	3	3	2	4	3	3	3	4	2	3	4	3	3	2	2	2	2	4	3	Memadai			
<b>E</b>	<b>PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>																															<b>Memadai</b>																
1	Kewenangan direviu secara periodik	2	2	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	4	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	Memadai					
2	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	4	3	Memadai			
3	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	4	3	Memadai			
<b>F</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>																															<b>Memadai</b>																
1	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	2	2	3	3	3	3	3	3	1	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	Memadai		
2	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	2	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	3	3	3	4	3	2	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	2	3	3	4	3	Memadai		
4	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	4	3	3	4	2	3	3	3	3	2	2	3	3	4	3	Memadai		
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	2	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	2	2	3	2	3	3	2	3	4	1	2	3	3	3	3	3	4	1	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	3	4	3	Memadai			
6	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	4	2	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	4	2	3	2	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	2	4	3	Memadai		

7	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	4	2	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	4	3	2	3	3	3	3	3	4	1	3	4	2	3	3	3	3	3	2	3	2	4	3	Memadai	
<b>G</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF</b>																																								<b>Memadai</b>						
1	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	Memadai	
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	Memadai
3	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	Memadai	
4	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	2	4	2	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	Memadai	
5	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	Memadai		
<b>H</b>	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>																																								<b>Memadai</b>						
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	Memadai		
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	2	3	3	4	3	Memadai		

**CEE BERDASARKAN DOKUMEN KONDISI KERENTANAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas			
Tahun Penilaian	: 2023			
Urusan	: Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan			
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Uraian Kekuatan	Klasifikasi
a	b	c	d	e
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Stock Opname dan Kas Opname Tahun 2021 pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Nomor 700/176.PKPT/25/IRBAN.4/ST.043/2022 tanggal 25 Januari 2022	Belum semua penggunaan barang persediaan dibuatkan Surat Permintaan Barang (SPB) dan Surat Penyerahan Permintaan Barang (SPPB) dan dituangkan dalam Berita Acara Stock Opname Barang	SK Bupati Banyumas Nomor 028/1095/Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021	Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia
2	Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 700/98.PKPT/238/IRBAN.4/ST.071/2022 tanggal 29 Juli 2022	Bappedalitbang belum menyusun tujuan, sasaran beserta indikator nya dengan memenuhi kriteria SMART	Kualitas dan kemanfaatan dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis	Kepemimpinan yang Kondusif
3	Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 700/ST.PKPT/163/ST.050/IRBAN.4/2022 tanggal 30 Juni 2022	Bappedalitbang belum melaksanakan monitoring evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, penanganan pengaduan masyarakat, dan penanganan benturan kepentingan.	SK Pejabat Kepala Bappedalitbang No 800/032/Tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2022	Kepemimpinan yang Kondusif

\*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan

Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

**SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Banyumas					
Tahun Penilaian		: 2023					
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai		Memadai		Memadai	
2	Komitmen terhadap kompetensi	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	-
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Kurang Memadai	Bappedalitbang belum menyusun tujuan, sasaran beserta indikator nya dengan memenuhi kriteria SMART	Memadai		Kurang Memadai	Indikator Kinerja Utama dan indikatornya belum memenuhi kriteria SMART
			Bappedalitbang belum melaksanakan monitoring evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, penanganan pengaduan masyarakat, dan penanganan benturan kepentingan.				Belum adanya monitoring evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan informasi publik, penanganan pengaduan masyarakat dan penanganan benturan kepentingan
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	-
5	Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	-
6	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Kurang Memadai	Belum semua penggunaan barang persediaan dibuatkan Surat Permintaan Barang (SPB) dan Surat Penyerahan Permintaan Barang (SPPB) dan dituangkan dalam Berita Acara Stock Opname Barang	Memadai		Kurang Memadai	Belum adanya monitoring evaluasi secara berkala
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	-
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	-

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023		
Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai	: Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan : Bappedalitbang		
Sumber Data	Renstra Perubahan Bappedalitbang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023		
Tujuan Strategis	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		
	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah		
	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		
Sasaran Strategis	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah		
	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan		
	Meningkatnya pencapaian tujuan pemerintah daerah		
Indikator Kinerja Sasaran		<b>IKU</b>	<b>2023</b>
	1	Persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional	80%
	2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	70%
	3	Rata-rata persentase capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	90%
Informasi lain	<b>Tujuan Strategis :</b>		
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		
	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah		
	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<b>Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah</b>		
	Sasaran 1 :Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah		
	Indikator Sasaran 1: Persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional		
	<b>Tujuan 2: Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah</b>		
	Sasaran 2 :Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan		
	Indikator Sasaran 2: Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		
	<b>Tujuan 3: Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</b>		
	Sasaran 3 : Meningkatnya pencapaian tujuan pemerintah daerah		
	Indikator Sasaran 3: Rata-rata persentase capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah		
	 Puncokerto, 30 Maret 2023 KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN BANYUMAS Ir KRISTANTA, M.Si NIP. 19650515 1998031 012		

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL****BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023		
Urusan Pemerintahan	: Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		
OPD yang Dinilai	: Bappedalitbang		
Sumber Data	Renja Bappedalitbang Tahun 2023		
Tujuan Strategis	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		
	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah		
	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		
Program Bappedalitbang, Kegiatan Utama dan Sub Kegiatan	1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
	a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Daerah		
	b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
	c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
	2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
	a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
	b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
	c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
	3. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah		
	a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
	b. Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan		
	c. Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		
	d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
	Keluaran/Hasil Indikator Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	2 dokumen
		Persentase keterisian data profil daerah	85%
		Persentase Program RKPD yang dijabarkan secara konsisten ke dalam APBD	100%
Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun		3 dokumen	
Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang disusun		2 dokumen	
Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun		3 dokumen	
Jumlah dokumen bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun		8 dokumen	
Jumlah dokumen bidang sosial dan kependudukan yang disusun		5 dokumen	
Jumlah dokumen bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun		5 dokumen	
Jumlah dokumen inovasi daerah yang disusun		1 dokumen	
Informasi Lain		-	
Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan	Indikator	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	
	Analisis Data Dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keterisian data profil daerah	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	Persentase Program RKPD yang dijabarkan secara konsisten ke dalam APBD	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun	

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang disusun
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun
Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	Jumlah dokumen bidang sosial dan kependudukan yang disusun
Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen inovasi daerah yang disusun
<div style="text-align: center;">  <p>Purwokerto, 30 Maret 2023  KEPALA BAPPEDALITBANG  KABUPATEN BANYUMAS</p> <p>Ir KRISTANTA, M.Si  NIP. 19650515 1993031 012</p> </div>	

### FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas									
Nama OPD	: Bappedalitbang									
Tahun Penilaian	: 2023									
Periode yang dinilai	: Renstra Perubahan Tahun 2018-2023									
Tujuan Strategis	: 1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah : 2. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah : 3. Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah									
Urusan Pemerintahan	: Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan									
OPD yang Dinilai	: Bappedalitbang									
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan:									
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan									
	Sasaran:									
	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah	Persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional	Prioritas daerah tidak mendukung prioritas nasional	501	Kepala Bappedalitbang	Pembagian kewenangan dalam mendukung prioritas nasional kurang jelas	eksternal	UC	Daerah tidak berkontribusi terhadap capaian nasional	1. Kepala Daerah 2. Kepala OPD 3. Masyarakat
2	Tujuan:									
	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah									
	Sasaran									
	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Hasil penelitian dan pengembangan belum digunakan sebagai dasar kebijakan	505	Kepala Bappedalitbang	Masih kurangnya pemahaman pengambil kebijakan terhadap evidence based policy	eksternal	C	Ketidaktepatan dalam menentukan kebijakan	1. Kepala Daerah 2. Kepala OPD 3. Masyarakat

			Inovasi belum mampu mengatasi permasalahan pembangunan	505	Kepala Bappedalitbang	Pengembangan inovasi belum dilaksanakan secara menyeluruh	internal	C	Ketidaktepatan dalam menentukan kebijakan	1. Kepala Daerah 2. Kepala OPD 3. Masyarakat
3	Tujuan:									
	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah									
	Sasaran									
	Meningkatnya pencapaian tujuan pemerintah daerah	Rata-rata persentase capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	Fokus kinerja pembangunan belum dilaksanakan secara konsisten	501	Kepala Bappedalitbang	Kurangnya kerjasama stakeholder pembangunan dalam mengambil peran sesuai dengan kewenangannya	eksternal	C	Capaian kinerja pemerintah daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya	1. Kepala Daerah 2. Kepala OPD 3. DPRD 4. Masyarakat
			Kegagalan dalam mitigasi risiko perangkat daerah			Belum adanya SOP pengelolaan risiko ditingkat perangkat daerah	internal	C	Target akhir kinerja pembangunan tidak tercapai	1. Kepala Daerah 2. Kepala OPD 3. Masyarakat

## FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Nama OPD	: Bappedalitbang
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: Renstra Perubahan Tahun 2018-2023
Tujuan Strategis	: 1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 2. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah 3. Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Sasaran Strategis OPD	: 1. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah 2. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan 3. Meningkatnya pencapaian tujuan pemerintah daerah
Urusan Pemerintahan	: Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
OPD yang Dinilai	: Bappedalitbang

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	Perencanaan	Personil tim penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan belum berkontribusi secara optimal	501	Kepala Bidang	Tumpang tindih penugasan	I	C	Keterlambatan penetapan dokumen perencanaan	1. Pemerintah Daerah 2. OPD 3. Masyarakat
			Pelaksanaan	Pendanaan tidak konsisten dalam mendukung target kinerja dalam dokumen perencanaan		Kepala Bidang	Ketidaksesuaian analisis kondisi keuangan daerah dengan kemampuan anggaran yang ada	I	C	Target kinerja tidak tercapai	1. Pemerintah Daerah 2. OPD 3. Masyarakat
2	Analisis Data Dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keterisian data profil daerah	Pelaksanaan	Keterisian data profil daerah belum lengkap	501	Kepala Bidang Rendalev	Kurangnya ketersediaan data dari OPD	E	C	Perencanaan dan penganggaran pembangunan kurang efektif menyelesaikan	1. Pemerintah Daerah 2. OPD 3. Masyarakat
			Pelaksanaan	Kualitas data belum memadai		Kepala Bidang	Belum semua penanggung jawab data menyajikan data secara akurat dan valid	E	C	Perencanaan dan penganggaran pembangunan kurang efektif menyelesaikan permasalahan	1. Pemerintah Daerah 2. OPD 3. Masyarakat

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	Persentase Program RKPd yang dijabarkan secara konsisten ke dalam APBD	Evaluasi	Perencanaan kurang sinkron dengan hasil evaluasi periode sebelumnya		Kepala Bidang	Hasil pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya digunakan sebagai bahan penyusunan rencana	I	C	Perencanaan dan pengalokasian anggaran kurang efektif	1. Pemerintah Daerah 2. OPD 3. Masyarakat
4	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun	Pelaksanaan	Ketidakselarasan antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	501	Kepala Bidang PPM	Pelaksana koordinasi dan penyusun dokumen perencanaan perangkat daerah belum memahami substansi secara memadai	E	C	Tidak adanya konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1. Pemerintah Daerah 2. OPD 3. Masyarakat
				Ketidakselarasan antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Pemerintah Daerah	501	Kepala Bidang PPM	Adanya kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah	E	C	Kegiatan Perangkat Daerah kurang mendukung capaian kinerja Pemerintah Daerah	1. Pemerintah Daerah 2. OPD 3. Masyarakat
5	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang disusun	Pelaksanaan	Ketidakselarasan antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	501	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	Pelaksana koordinasi dan penyusun dokumen perencanaan perangkat daerah belum memahami substansi secara memadai	E	C	Tidak adanya konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1. Pemerintah Daerah 2. OPD 3. Masyarakat
				Ketidakselarasan antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA dengan Pemerintah Daerah	501	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	Adanya kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah	E	C	Kegiatan Perangkat Daerah kurang mendukung capaian kinerja Pemerintah Daerah	1. Pemerintah Daerah 2. OPD 3. Masyarakat
6	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun	Pelaksanaan	Ketidakselarasan antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	501	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Pelaksana koordinasi dan penyusun dokumen perencanaan perangkat daerah belum memahami substansi secara memadai	E	C	Tidak adanya konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1. Pemerintah Daerah 2. OPD 3. Masyarakat

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Ketidakselarasan antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Pemerintah Daerah	501	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Adanya kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah	E	C	Kegiatan Perangkat Daerah kurang mendukung capaian kinerja Pemerintah Daerah	1. Pemerintah Daerah 2. OPD 3. Masyarakat
7	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	Pelaksanaan	Ketidakselarasan implementasi pelaksanaan kajian strategis bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan dengan kebutuhan daerah	505	Kepala Bidang Litbang	Urgensi kajian strategis sehubungan situasi kondisi yang dinamis	E	C	Implementasi penyusunan kajian yang telah direncanakan tidak tercapai	1. Pemerintah Daerah 2. OPD 3. Masyarakat
8	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	Jumlah dokumen bidang sosial dan kependudukan yang disusun	Pelaksanaan	Ketidakselarasan pelaksanaan kajian strategis bidang sosial dan kependudukan dengan kebutuhan daerah	505	Kepala Bidang Litbang	Urgensi kajian strategis sehubungan situasi kondisi yang dinamis	E	C	Implementasi penyusunan kajian yang telah direncanakan tidak tercapai	1. Pemerintah Daerah 2. OPD 3. Masyarakat
9	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	Pelaksanaan	Ketidakselarasan implementasi pelaksanaan kajian strategis bidang ekonomi dan pembangunan dengan kebutuhan daerah	505	Kepala Bidang Litbang	Urgensi kajian strategis sehubungan situasi kondisi yang dinamis	E	C	Implementasi penyusunan kajian yang telah direncanakan tidak tercapai	1. Pemerintah Daerah 2. OPD 3. Masyarakat
10	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen inovasi daerah yang disusun	Pelaksanaan	Fasilitasi pengembangan inovasi dan teknologi tidak optimal	505	Kepala Bidang Litbang	Kurangnya kompetensi SDM yang memadai dalam fasilitasi pengembangan inovasi dan teknologi	E	C	Implementasi penyusunan pengembangan inovasi dan teknologi yang telah direncanakan tidak tercapai	1. Pemerintah Daerah 2. OPD 3. Masyarakat

### FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas				
Tahun Penilaian	: 2023				
Tujuan Strategis	: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah : Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah : Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah				
Urusan Pemerintahan	: Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan				
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak *)	Skala Probabilitas *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>				
1	Prioritas daerah tidak mendukung prioritas nasional	501	3.20	2.50	8.00
2	Hasil penelitian dan pengembangan belum digunakan sebagai dasar kebijakan	505	3.70	3.30	12.21
3	Inovasi belum mampu mengatasi permasalahan pembangunan	505	3.10	3.00	9.30
4	Fokus kinerja pembangunan belum dilaksanakan secara konsisten	501	4.00	3.00	12.00
5	Kegagalan dalam mitigasi risiko perangkat daerah	501	3.40	2.70	9.18
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>				
1	Personil tim penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan belum berkontribusi secara optimal	501	3.70	3.30	12.21
2	Pendanaan tidak konsisten dalam mendukung target kinerja dalam dokumen perencanaan	501	3.70	3.30	12.21
3	Keterisian data profil daerah belum lengkap	501	2.90	2.60	7.54
4	Kualitas data belum memadai	501	3.70	3.40	12.58
5	Perencanaan kurang sinkron dengan hasil evaluasi periode sebelumnya	501	3.80	3.40	12.92
6	Ketidakselarasan antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	501	3.20	2.60	8.32
7	Ketidakselarasan antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Pemerintah Daerah	501	3.10	2.60	8.06
8	Ketidakselarasan antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	501	3.10	2.60	8.06
9	Ketidakselarasan antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA dengan Pemerintah Daerah	501	3.10	2.60	8.06
10	Ketidakselarasan antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	501	3.20	2.60	8.32
11	Ketidakselarasan antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Pemerintah Daerah	501	3.10	2.60	8.06
12	Ketidakselarasan implementasi pelaksanaan kajian strategis bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan dengan kebutuhan daerah	505	3.30	2.80	9.24
13	Ketidakselarasan pelaksanaan kajian strategis bidang sosial dan kependudukan dengan kebutuhan daerah	505	3.30	2.60	8.58
14	Ketidakselarasan implementasi pelaksanaan kajian strategis bidang ekonomi dan pembangunan dengan kebutuhan daerah	505	3.30	2.60	8.58
15	Fasilitasi pengembangan inovasi dan teknologi tidak optimal	505	3.00	2.90	8.70

Keterangan:

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat tinggi	20 - 25	Merah
Tinggi	16 - 19	Orange
Sedang	12 - 15	Kuning
Rendah	6 - 11	Biru
Sangat rendah	1 - 5	Hijau

### FORMULIR KERTAS KERJA DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas					
Tahun Penilaian	: 2023					
Tujuan Strategis	: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah : Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah : Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah					
Urusan Pemerintahan	: Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>					
1	Hasil penelitian dan pengembangan belum digunakan sebagai dasar kebijakan	505	12.21	Kepala Bappedalitbang	Masih kurangnya pemahaman pengambil kebijakan terhadap evidence based policy	Ketidaktepatan dalam menentukan kebijakan
2	Fokus kinerja pembangunan belum dilaksanakan secara konsisten	501	12.00	Kepala Bappedalitbang	Kurangnya kerjasama stakeholder pembangunan dalam mengambil peran sesuai dengan kewenangannya	Capaian kinerja pemerintah daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>					
1	Personil tim penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan belum berkontribusi secara optimal	501	12.21	Kepala Bidang	Tumpang tindih penugasan	Keterlambatan penetapan dokumen perencanaan
2	Pendanaan tidak konsisten dalam mendukung target kinerja dalam dokumen perencanaan	501	12.21	Kepala Bidang	Ketidaksesuaian analisis kondisi keuangan daerah dengan kemampuan anggaran yang ada	Target kinerja tidak tercapai
3	Kualitas data belum memadai	501	12.58	Kepala Bidang	Belum semua penanggung jawab data menyajikan data secara akurat dan valid	Perencanaan dan penganggaran pembangunan kurang efektif menyelesaikan permasalahan pembangunan
4	Perencanaan kurang sinkron dengan hasil evaluasi periode sebelumnya	501	12.92	Kepala Bidang	Hasil pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya digunakan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan	Perencanaan dan pengalokasian anggaran kurang efektif

## FORMULIR KERTAS KERJA

## PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN UNTUK LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Banyumas							
Tahun Penilaian : 2023							
No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	E/KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>I</b>	<b>Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia</b>						
1	Belum semua penggunaan barang persediaan dibuatkan Surat Permintaan Barang (SPB) dan Surat Penyerahan Permintaan Barang (SPPB) dan dituangkan dalam Berita Acara Stock Opname Barang	SK Bupati Banyumas Nomor 028/1095/Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan pengelolaan barang persediaan	Sekretaris	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2023
<b>II</b>	<b>Kepemimpinan yang Kondusif</b>						
2	Bappedalitbang belum melaksanakan monitoring evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, penanganan pengaduan masyarakat, dan penanganan benturan kepentingan.	SK Pejabat Kepala Bappedalitbang No 800/032/Tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2022	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan informasi publik	Sekretaris	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2023
3	Bappedalitbang belum menyusun tujuan, sasaran beserta indikator nya dengan memenuhi kriteria SMART	Kualitas dan kemanfaatan dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Evaluasi atas kesesuaian indikator kinerja utama	Kepala Badan	Triwulan I Tahun 2023

## FORMULIR KERTAS KERJA

## PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN UNTUK MENGATASI RISIKO

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah : Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah : Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Urusan Pemerintahan	: Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	<b>Risiko Strategis OPD</b>							
1	Hasil penelitian dan pengembangan belum digunakan sebagai dasar kebijakan	505	Hasil-hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi kebijakan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Koordinasi antar lembaga yang berkaitan dalam pengambilan kebijakan	Kepala Badan	Triwulan IV Tahun 2023
2	Fokus kinerja pembangunan belum dilaksanakan secara konsisten	501	Koordinasi dengan OPD maupun lembaga lainnya	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Menjalin koordinasi yang intens antar pelaku pembangunan	Kepala Badan	Triwulan II, IV Tahun 2023
	<b>Risiko Operasional OPD</b>							
1	Personil tim penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan belum berkontribusi secara optimal	501	SK/Surat Tugas penyusunan dokumen perencanaan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Peningkatan kapasitas dan komitmen personil tim penyusun dokumen perencanaan	Kepala Bidang	Triwulan II Tahun 2023
2	Pendanaan tidak konsisten dalam mendukung target kinerja dalam dokumen perencanaan	501	Integrasi aplikasi perencanaan dan penganggaran	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Komitmen tim perencanaan dan penganggaran	Kepala Bidang	Triwulan IV Tahun 2023
3	Kualitas data belum memadai	501	Koordinasi dengan OPD, BPS maupun lembaga lainnya	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Monitoring secara berkala berkaitan dengan keterisian data dan membangun komitmen bersama pentingnya kualitas data	Kepala Bidang	Triwulan II, IV Tahun 2023
4	Perencanaan kurang sinkron dengan hasil evaluasi periode sebelumnya	501	Desk monitoring dan evaluasi capaian kinerja	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Peningkatan kapasitas dan komitmen tim perencanaan	Kepala Bidang	Triwulan IV Tahun 2023

**RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
 Tahun Penilaian : 2023  
 Tujuan Strategis : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah  
 : Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah  
 : Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah  
 Urusan Pemerintahan : Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

NO	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
	<b>Strategis</b>						
1	Koordinasi antar lembaga yang berkaitan dalam pengambilan kebijakan	FGD, diseminasi hasil riset	Bappedalitbang	OPD	Triwulan IV Tahun 2023		
2	Menjalin koordinasi yang intens antar pelaku pembangunan	Rapat, koordinasi, konsultasi, desk	Bappedalitbang	OPD	Triwulan II, IV Tahun 2023		
1	Peningkatan kapasitas dan komitmen personil tim penyusun dokumen perencanaan	Rapat, koordinasi, konsultasi, bimtek	Bappedalitbang	OPD	Triwulan II Tahun 2023		
2	Komitmen tim perencanaan dan penganggaran	Rapat, koordinasi, konsultasi	Bappedalitbang, BKAD, Setda	OPD	Triwulan IV Tahun 2023		
3	Monitoring secara berkala berkaitan dengan keterisian data dan membangun komitmen bersama pentingnya kualitas data	Rapat, koordinasi, konsultasi, desk	Bappedalitbang	OPD	Triwulan II dan IV Tahun 2023		
4	Peningkatan kapasitas dan komitmen tim perencanaan	Rapat, koordinasi, konsultasi, bimtek	Bappedalitbang,	OPD	Triwulan IV Tahun 2023		

**RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
 Tahun Penilaian : 2023  
 Tujuan Strategis : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah  
 : Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah  
 : Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah  
 Urusan Pemerintahan : Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Koordinasi antar lembaga yang berkaitan dalam pengambilan kebijakan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Badan	Semester II		
2	Menjalin koordinasi yang intens antar pelaku pembangunan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Badan	Semester I		
3	Peningkatan kapasitas dan komitmen personil tim penyusun dokumen perencanaan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang	Semester I		
4	Komitmen tim perencanaan dan penganggaran	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang	Semester II		
5	Monitoring secara berkala berkaitan dengan keterisian data dan membangun komitmen bersama pentingnya kualitas data	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang	Semester II		
6	Peningkatan kapasitas dan komitmen tim perencanaan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang	Semester II		

### PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
 Tahun Penilaian : 2023  
 Tujuan Strategis : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah  
 : Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah  
 : Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah  
 Urusan Pemerintahan : Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan	Ket.
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>									
1	Prioritas daerah tidak mendukung prioritas nasional	501								
2	Hasil penelitian dan pengembangan belum digunakan sebagai dasar kebijakan	505					Koordinasi antar lembaga yang berkaitan dalam pengambilan kebijakan	Triwulan IV Tahun 2023		
3	Inovasi belum mampu mengatasi permasalahan pembangunan	505								
4	Fokus kinerja pembangunan belum dilaksanakan secara konsisten	501					Menjalin koordinasi yang intens antar pelaku pembangunan	Triwulan II, IV Tahun 2023		
5	Kegagalan dalam mitigasi risiko perangkat daerah	501								
	Masalah/Risiko Baru:									
	.....									
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>									
1	Personil tim penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan belum berkontribusi secara optimal	501					Peningkatan kapasitas dan komitmen personil tim penyusun dokumen perencanaan	Triwulan II Tahun 2023		



